

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintahan yang baik atau biasa disebut *good government governance*, sangat dibutuhkan oleh pemerintahan dunia termasuk di Indonesia. Implikasi otonomi daerah dalam akuntansi sektor publik adalah dalam rangka pelaksanaannya pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak lain yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah². Tuntutan mengenai otonomi daerah dan pemerintahan yang demokratis di daerah sebagai konsekuensi dan implikasi globalisasi, otonomi selalu erat kaitannya dengan definisi "kebebasan" dan "kemandirian". Sesuatu akan dianggap otonomi jika ia mampu menentukan diri sendiri, mengatur diri sendiri, dan berjuang berdasarkan kewenangan, kekuasaan dan prakarsa sendiri.³

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam lingkup pemerintahan telah menjadi sarana untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, politik bahkan sosial. Dalam rangka mencapai

² Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: CV Andi Offset.2009) hal 24

³ Domai Tjahyanulin, Manajemen Keuangan Publik, (Malang: UB Press . 2013) hal 135

pemerintahan yang baik (*good government governance*), masyarakat telah mendorong pemerintah. agar menerapkan akuntabilitas publik. Dalam akuntansi, akuntabilitas dapat diartikan sebagai cara mempertanggungjawabkan atau memberikan kejelasan atas keberhasilan atau kegagalan dari suatu aktivitas keuangan yang dilakukan. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha⁴.

Akuntansi sebagai sebuah ilmu pencatatan yang berkenaan dengan aktivitas keuangan juga meliputi akuntansi pemerintah, dimana saat ini tengah berkembang pesat. Hal ini terjadi akibat adanya transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan dalam pemerintah pusat, artinya akuntansi pemerintah juga hadir hingga di tingkat daerah sampai wilayah pedesaan, hal ini dilakukan karena seluruh bagian pemerintah membutuhkan pertanggungjawaban atas setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun, terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait dengan

⁴ Haryanto,Sahmudin dkk. Akuntansi Sektor Publik (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007) hal 7

pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya pada daerah pedesaan.

Dimasa perkembangan ini, desa telah mulai menjelma menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga dapat menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan atas suatu daerah untuk mengatur sendiri masyarakatnya. Kewenangan untuk menjalankan kebijakan guna mensejahterakan masyarakat ada di tangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.⁵

Kebijakan dibuat oleh pemerintah desa dalam rangka mengupayakan kesejahteraan rakyat, ini dilaksanakan melalui banyak cara diantaranya pembangunan, yang akan membantu menengembangkan potensi daerah sesuai dengan visi misi daerah tersebut. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ HAW. Widjaja, Otonomi Desa merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,(Jakarta: Rajagrafindo. 2014) hal. 9

Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah Desa mengatur segenap kepentingan desa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa⁶. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) desa pada PP No 71 Tahun 2010 diterbitkan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah terkait keuangan desa, adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan (planning), penganggaran(calculating), penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

⁶ Haryanto,Sahmudin dkk. Akuntansi Sektor Publik (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007) hal 9

sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Disebutkan juga bahwa dalam pengelolaannya, keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁷ Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut, desa semakin terbuka dan memiliki responsibilitas. Sehingga harapan agar desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Fungsi utama akuntansi adalah mampu memberikan informasi keuangan, ini merupakan produk akuntansi yang sangat kuat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, meskipun bukan satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan, namun informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan. Dalam organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang memuat informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan informasi, jika syarat ini terpenuhi maka akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas pada lembaga sektor publik.⁸

Diberikannya anggaran pendapatan dan belanja desa, pemerintah bermaksud agar memudahkan dalam mengatur segala aktivitas desa kepada masyarakat. Artinya anggaran tersebut dapat digunakan untuk merencanakan

⁷ Permendagri 113 Tahun 2014 Bab II Pasal 2(1) tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 11

kegiatan yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan program kerja untuk mensejahterakan masyarakat desa, seperti halnya Pemerintah Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Asas transparansi ditujukan untuk memberitahu masyarakat akan anggaran yang digunakan oleh pemerintah guna melakukan pembangunan, dalam hal ini laporan yang dikeluarkan haruslah dapat mudah dipahami oleh masyarakat, demikian pula dalam akuntabilitas.

Pada prakteknya, pemerintah tengah mencanangkan asas transparansi untuk diterapkan di seluruh pemerintahan termasuk pemerintahan desa, namun ada kalanya transparansi tidak diikuti dengan akuntabilitas dari laporan yang telah diterbitkan. Hal ini menjadi masalah menarik mengingat desa yang merupakan cakupan kecil dari pemerintahan suatu Negara yang penyelenggaran pemerintahannya adalah bagian dari desa itu sendiri kerap kali mengundang rasa tidak percaya masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas yang disajikan. Tak hanya itu, perkembangan teknologi dengan adanya website desa seharusnya dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses sebagai bagian dari wujud fungsi pengawasan kerap kali tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga prinsip akuntansi dan akuntabilitas kurang tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pemerintah Desa Pandean dalam mewujudkan good government melalui asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Pandean.

Mengingat akuntabilitas dan transparansi adalah hal sangat penting, dari permasalahan diatas peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Apbdes Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.**

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana implementasi asas transparansi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean ?
2. Bagaimana implementasi asas akuntabilitas yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean ?
3. Bagaimana hambatan yang dialami pemerintah desa dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?
4. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menghadapi hambatan dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi asas transparansi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean
2. Untuk menganalisis implementasi asas akuntabilitas yang dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean

3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pemerintah desa pada dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
4. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menghadapi hambatan internal dan eksternal pada manajemen keuangan dalam pengelolaan Apbdes Desa Pandean untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

D. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: penelian difokuskan pada upaya membentuk good government dengan penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran serta faktor -faktor yang menghambat pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa beserta dengan upaya penyelesaian masalahnya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang keuangan desa tentang transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bahan literatur bagi civitas akademika UIN SATU Tulungagung maupun institusi pendidikan yang lain khususnya dalam mata kuliah Akuntansi sektor publik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti : Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang mewujudkan goodgovernment melalui penerapan asas tranparansi dan akuntabilitas serta dijadikan pedoman peneliti untuk lebih mengembangkan sistem perakuntansian desa.
- b. Akademik : Penelitian ini dapat menambah kebendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung khususnya dalam mata kuliah akuntansi sektor publik.
- c. Lembaga : Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan dapat memberian solusi atas masalah yang terjadi pada pengelolaan keuangan sehingga asas transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.
- d. Peneliti Lanjut : Penelitian ini dapat memberikan pandangan atau dapat dijadikan sebagai literature untuk peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa.

F. Definisi Istilah

Berkaitan dengan “**Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**”, diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak

diharapkan sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dan dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen though*). Menurut Masrdiasmo (2003:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.. Dengan demikian, maka transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi menjadi salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan dilingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan⁹. Transparansi juga mengundang rasa tanggungjawab lebih pada pelaksananya, dalam lingkup pemerintahan ada tanggungjawab besar di dalam kegiatan transparansi yang diungkapkan kepada masyarakat.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) artinya perbuatan (hal) yang bertanggungjawab; suatu keadaan untuk dipertanggungjawabkan; maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan unit organisasi

⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik....*, hal. 3

kepada pihak yang memiliki hak, atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam akuntansi, akuntabilitas suatu entitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas publik juga merupakan kewajiban seseorang (dalam hal ini pemerintah) untuk mengelola sumberdaya, melaporkan, mengungkapkan dan menerangkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya masyarakat.

3. Partisipatif

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.¹⁰

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan¹¹

5. Pemerintah Desa

¹⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta, Andi, 2018), hal. 23

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54135/perda-kab-tulungagung-no-1-tahun-2015>, diakses 1 Juni 2022

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa, yang mengandung prakiraan sumber pendapatan, dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang mana terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan barisan sistematis terkait urutan apa saja yang ada di dalam skripsi. Urutan sistematis ini bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami dengan seksama skripsi yang telah disusun melalui alur-alur yang sistematis. Penelitian ini disusun dalam 3 bagian, yakni bagian awal,

bagian utama, dan bagian akhir, kemudian disusun kembali kedalam 6 bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang tergambar dalam uraian dibawah ini :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini, penulis menguraikan gagasannya terkait:

- 1.1 Latar Belakang Penelitian, berisi penjelasan terkait persoalan yang akan diteliti atau alasan mengapa masalah tersebut dipandang menarik dan perlu diteliti.
- 1.2 Fokus Masalah, berisi topik-topik yang akan diungkap dalam penelitian ini atau gambaran besar apa yang akan diungkapkan melalui penelitian ini.
- 1.3 Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini.
- 1.4 Pembatasan Masalah, merupakan hal-hal yang menjadi batasan penelitian, bertujuan untuk memastikan penelitian agar tetap terarah atau fokus pada objek yang ingin diteliti
- 1.5 Manfaat Penelitian, merupakan bagian yang menjelaskan terkait pentingnya penelitian, baik manfaat secara teoritis (keilmuan), dan praktis (daya guna)
- 1.6 Definisi Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang tidak dan atau belum dipahami oleh pembaca skripsi. Disusunnya definisi istilah bertujuan untuk menghindari adanya salah pemahaman antara penulis dan pembaca atau antar pembaca, sehingga mengakibatkan salah tafsir.

- 1.7 Sistematika Penulisan Skripsi, berisi tentang urutan sistematis terkait skripsi yang disusun, dalam rangka membantu pembaca memahami penelitian melalui alur yang disajikan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan hal terkait :

- 2.1 Kajian Pustaka, merupakan kumpulan kajian teoritis yang berasal dari buku-buku teks yang berisikan teori besar (grand theory) dan teori-teori yang ada pada penelitian sebelumnya.
- 2.2 Kerangka Konseptual, merupakan kerangka konsep atau gambaran besar terkait bagaimana penelitian berjalan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti mengungkapkan terkait:

- 3.1 Pendekatan Penelitian, merupakan alasan mengapa pendekatan kualitatif digunakan, adapun bagaimana penulis mengemukakan penelitian studi kasus ini.
- 3.2 Jenis dan Sumber Data, berisi apa saja data yang dikumpulkan dari mana dan dari siapa saja data diperoleh..
- 3.3 Teknik Pengumpulan Data, merupakan cara bagaimana pengumpulan data dilakukan apakah menggunakan observasi, wawancara atau dokumentasi.
- 3.4 Teknik Analisis Data, menguraikan proses pengolahan data hasil wawancara dan atau observasi.

3.5 Pengecekan Keabsahan Data, mengungkap usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh keabsahan temuan.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis mengungkapkan hasil penelitian dengan menguraikan:

4.1 Paparan Data, merupakan pengungkapan data yang diperoleh. Paparan data diperoleh melalui observasi dan atau hasil wawancara dan deskripsi informasi yang telah dikumpulkan peneliti melalui prosesur pengumpulan data.

4.2 Temuan Penelitian, mengungkapkan temuan yang disajikan dalam bentuk kategori, klasifikasi dan tipologi.

Bab V Pembahasan

Pada bab ini, penulis menyajikan keterkaitan antara pola-pola dan kategori terhadap teori – teori yang ada dan penelitian-penelitian sebelumnya dengan apa yang ditemui di lapangan.

Bab VI Penutup

6.1 Kesimpulan, berisi makna sesungguhnya dari sekian uraian yang disajikan penulis disesuaikan dengan rumusan masalah.

6.2 Saran, merupakan rekomendasi atau pertimbangan hasil temuan ditujukan pada objek yang diteliti dalam rangka mengembangkan penelitian yang telah diselesaikan.